

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
STASIUN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BATAM TAHUN 2024



Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (LKj Stasiun KIPM Batam) Triwulan IV tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Batam dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Batam Tahun 2023. Pada Triwulan I tahun 2024 sudah mencapai target dan sudah terealisasi 100%.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BKIPM di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Batam, 22 April 2024
Kepala Stasiun KIPM Batam

M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Gambaran Umum Kelembagaan	11
1.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	13
BAB II. RENCANA AKSI SKIPM BATAM	
2.1. Rencana Strategis	14
BAB III. EVALUASI KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	18
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	20
3.3. Realisasi Anggaran	46
BAB IV. PENUTUP	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator dan Target Kinerja SKIPM Batam Tahun 2024	16
Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator ,Target , dan Realisasi Kinerja SKIPM Batam Tahun 2024	18
Tabel 3 Capaian Kinerja SKIPM Batam Tahun 2024.....	22
Tabel 4. Target dan Realisasi IK 1 pada tahun 2024	23
Tabel 5 Target dan Realisasi IK 2 pada tahun 2024.....	24
Tabel 6. Target dan Realisasi IK 3 pada tahun 2024	25
Tabel 7. Target dan Realisasi IK 4 pada tahun 2024.....	26
Tabel 8 Target dan Realisasi IK 5 pada tahun 2024	26
Tabel 9. Target dan Realisasi IK 6 pada tahun 2024	27
Tabel 10. Target dan Realisasi IK 7 pada tahun 2024.....	28
Tabel 11 Target dan Realisasi IK 8 pada tahun 2024	29
Tabel 12. Target dan Realisasi IK 9 pada tahun 2024	30
Tabel 13. Target dan Realisasi IK 10 pada tahun 2024	31
Tabel 14 Target dan Realisasi IK 11 pada tahun 2024	32
Tabel 15 Target dan Realisasi IK 12 pada tahun 2024	33
Tabel 16. Target dan Realisasi IK 13 pada tahun 2024	34
Tabel 17. Target dan Realisasi IK 14 pada tahun 2024	36
Tabel 18 Target dan Realisasi IK 15 pada tahun 2024	36
Tabel 19. Target dan Realisasi IK 16 pada tahun 2024	37
Tabel 20. Target dan Realisasi IK 17 pada tahun 2024	38
Tabel 21. Target dan Realisasi IK 18 pada tahun 2024	39
Tabel 22. Target dan Realisasi IK 19 pada tahun 2024	40
Tabel 23. Target dan Realisasi IK 20 pada tahun 2024	41
Tabel 24. Target dan Realisasi IK 21 pada tahun 2024	42
Tabel 25. Target dan Realisasi IK 22 pada tahun 2024	43
Tabel 26. Target dan Realisasi IK 23 pada tahun 2024.....	43
Tabel 27. Target dan Realisasi IK 24 pada tahun 2024	44
Tabel 28. Target dan Realisasi IK 25 pada tahun 2024	44
Tabel 29. Target dan Realisasi IK 26 pada tahun 2024.....	44
Tabel 30. Target dan Realisasi IK 27 pada tahun 2024	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....	10
Gambar 2. Peta Strategi BKIPM Tahun 2020 – 2024.....	15
Gambar 3. Dashboard Capaian IKU SKIPM Batam Tahun 2024.....	18

IKHTISAR EKSEKUTIF

. Terdapat 19 indikator kinerja di Triwulan I Tahun 2024, dan telah tercapai pemenuhan target sampai dengan Triwulan I. Uraian dan status capaian dari 19 indikator tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Batam (sertifikat)	5
		2.	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor-impornya lingkup UPT SKIPM Batam (produk)	1
		3	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	1
		4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT SKIPM Batam (UPI)	2
		5	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Batam (produk)	30
		6	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Batam (UPI)	18
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam (nilai)	84
		8	Unit Kerja yang menerapkan Standar Pelayanan Publik lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	1
		9	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Batam (Parameter)	1

		10	Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup SKIPM Batam (lokasi)	1
		11	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	1
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Batam (Indeks)	86
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Batam (Nilai)	82
		14	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT SKIPM Batam (%)	100
		15	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Batam (%)	80
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	82
		18	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam (%)	80
		19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup SKIPM Batam (%)	80

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TW I	
					TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Batam	Sertifikat	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	0,00	0,00
2	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor-impornya lingkup UPT SKIPM Batam	Produk	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
3	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT SKIPM Batam	Lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00

4	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT SKIPM Batam	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	0,00	0,00
5	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Batam	Produk	Nilai Posisi Akhir	Bulan	10,00	15
6	UPI yang konsistensi menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Batam	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	8,00	11
7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam	nilai	Nilai Posisi Akhir	Bulan	84,00	94,44
8	Unit Kerja yang menerapkan Standar Pelayanan Publik lingkup UPT SKIPM Batam	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
9	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Batam	Parameter	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
10	Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup SKIPM Batam	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
11	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Batam	Lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Batam	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	0,00
13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Batam	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
14	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT SKIPM Batam	%	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
15	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Batam	%	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	80,00	98,53
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	0,00
17	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
18	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam	%	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup SKIPM Batam	%	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kinerja keuangan Stasiun KIPM Batam Tahun 2024 melalui program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan pagu alokasi anggaran triwulan I sebesar Rp 6.299.219.000 Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Batam 2024 Triwulan I mencapai Rp. 986.154.019,- atau sebesar 24.45%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/2011, Stasiun KIPM Batam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Stasiun KIPM Batam mempunyai tugas Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2011 Stasiun KIPM Batam mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Pasal 4 menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya daridalam wilayah Negara RepublikIndonesia;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negaratujuan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawaHPIK;
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
6. Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mututerpadu.
7. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasilperikanan;
8. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasilperikanan;
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasilperikanan;

10. Penerapan sistim manajemen mutu pada laboratorium dan pelayananoperasional;
11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atauHPIK;
12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawain, keuangan dan rumahtangga.

Sampai dengan tahun 2024 struktur organisasi Stasiun KIPM Batam dapat dilihat padagambar berikut ini:



Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KIPM BATAM

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Batam dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja (LKj). LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun KIPM Batam dalam rangka melaksanakan misi Stasiun KIPM Batam dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Batam. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Stasiun KIPM Batam

BKIPM dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil

perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. Pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. Pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. Mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan perkarantina, keamanan hayati ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dilihat dari prioritas pembangunan kelautan dan perikanan, sebagai berikut :

- a. Pengawasan terintegrasi di wilayah perbatasan;
- b. Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. Daya Saing dan Nilai Tambah Hasil Perikanan

1.4 Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan penyajian LKJ Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Dalam rangka menyatukan arah dan mendorong terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi dengan optimal, Stasiun KIPM Batam mempunyai visi yang ingin dicapai yaitu “ **Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi Dan Terpercaya**”.

2.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Stasiun KIPM Batam adalah sebagai berikut :

1. Terbebasnya wilayah Batam dari masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan darisuat area ke area lain;
2. Meningkatkan teknik dan metode pemeriksaan karantina ikan dengan cara mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan saranalaboratorium;
3. Menyediakan referensi identifikasi HPI/HPIK media pembawa dan menginventarisir serta pemetaan HPI/HPIK;
4. Meningkatkan pengawasan operasional karantina ikan;
5. Meningkatkan pemahaman dan peran serta pengguna jasa karantina ikan dalam pelaksanaan tindak karantinaikan;
6. Meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa karantina ikan melalui pemanfaatan sisteminformasi;
7. Mengembangkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif danefisien.

2.3 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Stasiun KIPM Batam, adalah sebagai berikut;

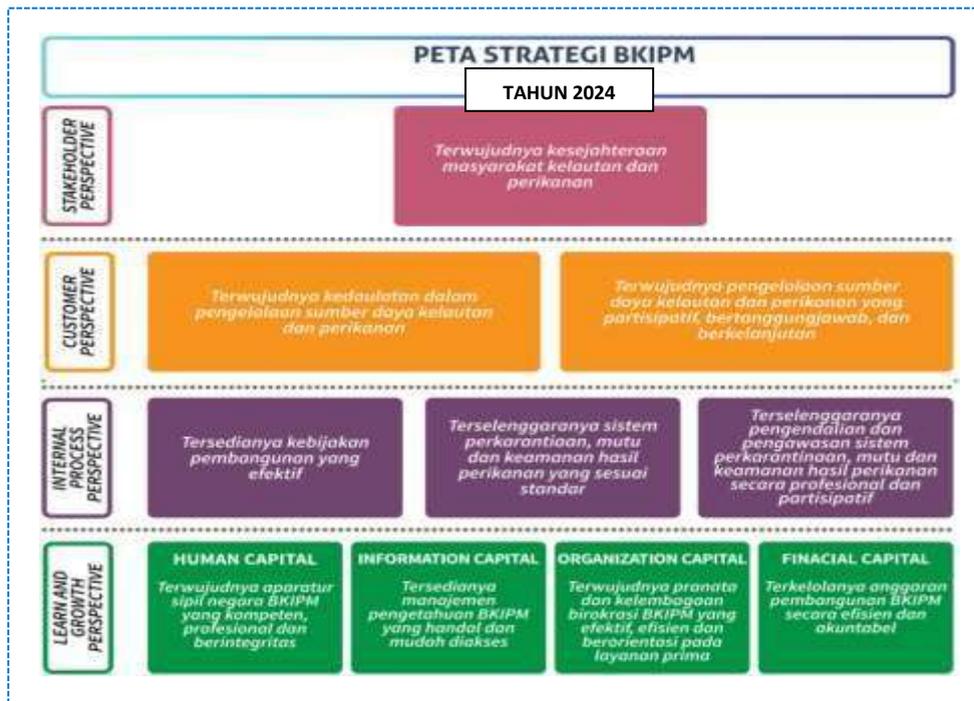
1. Tersedianya prasarana karantina ikan yang memadai untuk pelaksanaan tupoksi karantinaikan;
2. Tersedianya sarana karantina ikan yang memadai untuk pelaksanaan tupoksi karantina ikan;
3. Tersedianya SDM fungsional karantina ikan yang profesional;
4. Tersedianya prasarana dan sarana pemeriksaan laboratorium;

5. Tersedianya peta daerah sebar HPI/HPIK, koleksi spesimen HPI/HPIK dan media pembawa;
6. Menurunnya tingkat pelanggaran peraturan perundangan karantina ikan;
7. Meningkatkan pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK;
8. Meningkatkan sistem informasi mengenai TKI;
9. Tersedianya aplikasi sistem administrasi perkantoran;
10. Tersedianya pegawai administrasi yang terlatih.

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (LKj Stasiun KIPM Batam) Triwulan I tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Batam dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Batam Tahun 2023. Pada Triwulan I tahun 2024 semua target terealisasi 100%. Stasiun KIPM Batam telah menetapkan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Batam tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini

Gambar 1.2 Peta Strategis SKIPM Batam Tahun 2024



Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Batam Tahun 2024

Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Batam (sertifikat)	5
		2.	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor-impornya lingkup UPT SKIPM Batam (produk)	1
		3	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	1
		4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT SKIPM Batam (UPI)	2
		5	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Batam (produk)	30
		6	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Batam (UPI)	18
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam (nilai)	84
		8	Unit Kerja yang menerapkan Standar Pelayanan Publik lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	1
		9	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Batam (Parameter)	1
		10	Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup SKIPM Batam (lokasi)	1
		10	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	1
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Batam (Indeks)	86

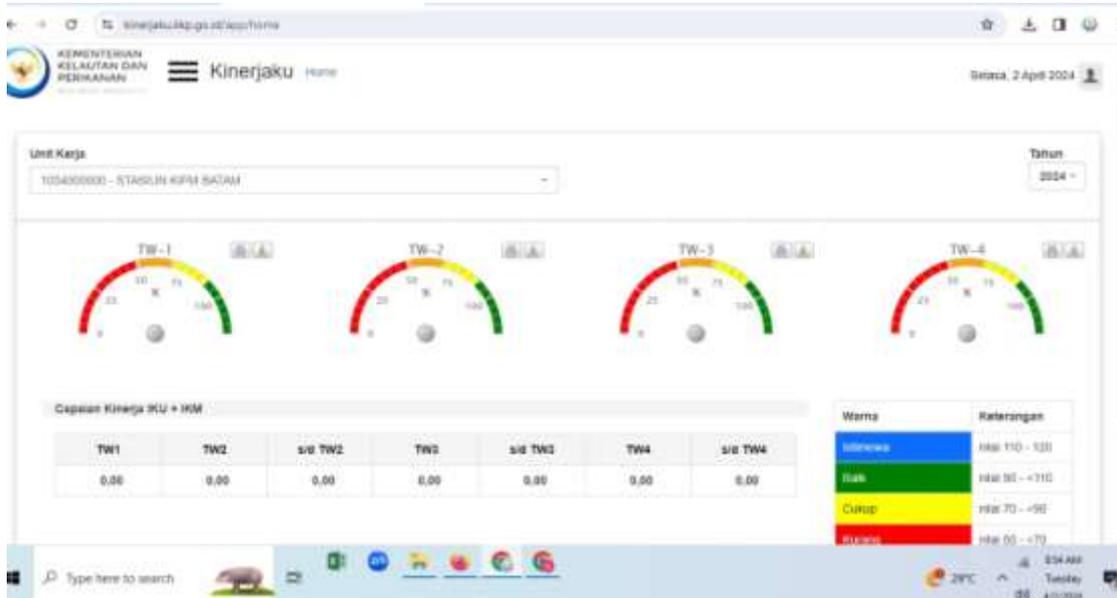
		12	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Batam (Nilai)	82
		13	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT SKIPM Batam (%)	100
		14	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Batam (%)	80
		15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	93,76
		16	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	82
		17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam (%)	80
		18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup SKIPM Batam (%)	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Nilai pencapaian kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dapat diakses melalui aplikasi pengelolaan kinerja yaitu www.kinerjaku.kkp.go.id



Berikut ini disampaikan ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Batam tahun 2024 Triwulan I, sebagaimana disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Batam Triwulan I Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	POLA HITUNG	FREKUENSI PERHITUNGAN	TW I	
					TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Batam	Sertifikat	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	0,00	0,00
2	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor- impornya lingkup UPT SKIPM Batam	Produk	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
3	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT SKIPM Batam	Lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
4	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem tracebility lingkup UPT SKIPM Batam	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	0,00	0,00
5	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Batam	Produk	Nilai Posisi Akhir	Bulan	10,00	15

6	UPI yang konsistensi menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Batam	UPI	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	8,00	11
7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam	nilai	Nilai Posisi Akhir	Bulan	84,00	94,44
8	Unit Kerja yang menerapkan Standar Pelayanan Publik lingkup UPT SKIPM Batam	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
9	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Batam	Parameter	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
10	Unit Kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup SKIPM Batam	lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
11	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Batam	Lokasi	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Batam	Indeks	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	0,00
13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Batam	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
14	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT SKIPM Batam	%	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
15	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Batam	%	Nilai Posisi Akhir	Triwulan	80,00	98,53
16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Semester	0,00	0,00
17	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
18	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam	%	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00
19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup SKIPM Batam	%	Nilai Posisi Akhir	Tahun	0,00	0,00

3.2 Analisis dan Evaluasi

1.1 Kegiatan 1. Karantina Ikan

Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

1.2.IKU1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Batam

(sertifikat)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Supplier yang melakukan penanganan hasil perikanan sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu unit Supplier temenerapkan good manufacturing practices dan standard sanitation operatiprocedure secara konsisten. Sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Supplier yang melakukan pengolahan hasil perikanan sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu unit Supplier temenerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasar konsepsi PMMT/HACCP secara konsisten. Mengacu Keputusan Kepala BKIPM nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik di supplier sertifikat cara pengolahan ikan yang baik di supplier

Tabel 3 Capaian Target dan Realisasi IKU 1 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2022	2023	Target	Persen
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT SKIPM Batam	0	3	5	0	0	0	100%	0	0

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 1 diberikan anggaran sebesar Rp.34.500.000 dengan realisasi sebesar Rp.0, kegiatan untuk merealisasikan IKU 1 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

IKU2. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor-impornya lingkup UPT

SKIPM Batam (produk)

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Stasiun KIPM Batam adalah memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI dan penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilapor.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Penangan Importasi ikan dan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia bebas dari penyakit ikan karantina sesuai ketentuan yang berlaku melalui Tindakan karantina yang dilakukan terhadap importasi ikan dan hasil perikanan melalui penerbitan. a) surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan (KI-D7) dan b) sertifikat pelepasan (KI-D12) setelah dilakukan pengujian terhadap sampel produk dinyatakan bebas penyakit dan atau mutu dan keamanannya terjamin. Dari hasil perhitungan kegiatan importasi pada triwulan III tahun 2022 diketahui bahwa prosentase rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit ikan 100%. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian sampel yang diambil dari kegiatan importasi menunjukkan memenuhi mutu dan bebas penyakit ikan.

Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI dan penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilapor. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pemasukan hasil perikanan ke Indonesia menjadi kendala dalam pemenuhan kinerja rasio importasi yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit ikan akan tetapi hal ini dapat teratasi dengan baik dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa /pelaku usaha mengenai syarat-syarat pemasukan hasil/produk perikanan yang harus memenuhi standart kesehatan dan mutu keamanan pangan serta standar nasional Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan kunci keberhasilan capaian sasaran strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif dengan indikator kinerja utama persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit. Importir yang melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah RI harus memenuhi persyaratan legalitas dan berasal dari eksportir yang terdaftar di negara asal.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Perkembangan penyakit ikan yang dinamis dan berkembang pesatnya lalu lintas komoditi perikanan di pasar internasional menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan dari luar

wilayah Republik Indonesia. Hal ini perlu disikapi dengan langkah kongkrit BKIPM dalam menjalankan fungsi pencegahan penyakit ikan. Untuk itu sebagai saran dalam menjawab tantangan ini diantaranya diperlukan program peningkatan wawasan sumber daya manusia sebagai operator untuk terus update dan sarana prasarana pengujian laboratorium dalam menunjang identifikasi pengenalan penyakit baru sehingga bisa mencegah masuknya ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyakit ikan merupakan salah satu faktor pembatas optimalisasi produksi perikanan di Indonesia. Potensi sumber daya ikan di Indonesia sangat besar dan dapat dioptimalkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan bangsa oleh sebab itu faktor pembatas produksi dalam hal ini penyakit ikan harus dapat dicegah dan dikendalikan agar tidak masuk dari luar negeri dan menyebar yang kemudaiannya akan berdampak dan menimbulkan kerugian sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan peningkatan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana pengujian laboratorium yang mutakhir besar harapan tugas dan fungsi dalam pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina dapat senantiasa terlaksana dengan baik.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 2 diberikan anggaran sebesar Rp.14.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.0, kegiatan untuk merealisasikan IKU 2 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya .

Keberhasilan capaian sasaran strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif mempunyai IKU persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit angka persentase target tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian Target dan Realisasi IKU 2 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2022	2023	Target	Persen
Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor-impornya lingkup UPT SKIPM Batam (produk)	0	0	1	0	0	0	0	0	0

IKU3. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)

Indikator penjaminan mutu hasil perikanan domestic merupakan gabungan dari 2 (dua) kegiatan, yaitu monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya serta Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik. Monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Pada Triwulan III Tahun 2023, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengambilan contoh (ikan) di masing-masing lokus; b. Pengujian contoh, dengan parameter uji :

- Organoleptik
- Mikrobiologi : Coliform & Escherichia coli dan Salmonella;
- Residu kimia : logam berat Merkuri (Hg), Cadmium (Cd) dan Plumbun (Pb), Histamin;
- Cemaran Marine biotoxin (racun hayati laut) : Ciguatoxin, ASP, PSP dan DSP.

Sedangkan pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar domestik (moderen dan tradisional) dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing kab/kota. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01 tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/ Good Handling Practices (GHdP) terhadap pasar tradisional dan moderen; b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masingmasing lokus. c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu :

- Pengujian kesegaran ikan (organoleptik);
- Pengujian mikrobiologi (Total Plate Count, E. coli, Salmonella dan parameter lain apabila dibutuhkan);
- Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

Tabel 5 Capaian Target dan Realisasi IKU 3 pada Triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2022	2023	Target	Persen
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	0	1	1	0	0	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	1	1	100

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Penerapan tindakan karantina ikan terutama terhadap pemasukan media pembawa merupakan salah satu wujud penerapan hak berdaulat Negara Indonesia untuk melindungi wilayah Negara Republik Indonesia dari ancaman serangan masuknya hama dan penyakit ikan berbahaya dari luar negeri serta untuk mencegah dan mengendalikan masuknya jenis ikan dilarang (jenis asing invasif), PRG, SDG dan agensia hayati yang merupakan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati perikanan Indonesia. Hak berdaulat ini dijamin sesuai ketentuan yang ada pada perjanjian SPS, dan dalam pelaksanaannya mengacu pada kaidah dan standar internasional yang telah ditetapkan. Selain sebagai instrumen perlindungan sumber daya hayati perikanan, pelaksanaan tindakan karantina ikan diharapkan mampu memberikan nilai tambah serta meningkatkan daya saing hasil perikanan.. Untuk itu sebagai saran dalam menjawab tantangan ini diantaranya diperlukan program peningkatan wawasan sumber daya manusia sebagai operator untuk terus update dan sarana prasarana pengujian laboratorium dalam menunjang identifikasi pengenalan penyakit baru sehingga bisa mencegah masuknya ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyakit ikan merupakan salah satu faktor pembatas optimalisasi produksi perikanan di Indonesia. Potensi sumber daya ikan di Indonesia sangat besar dan dapat dioptimalkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan bangsa oleh sebab itu faktor pembatas produksi dalam hal ini penyakit ikan harus dapat dicegah dan dikendalikan agar tidak masuk dari luar negeri dan menyebar yang kemudaiannya akan berdampak dan menimbulkan kerugian sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan peningkatan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana pengujian laboratorium yang mutakhir besar harapan tugas dan fungsi dalam pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina dapat senantiasa terlaksana dengan baik.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 3 diberikan anggaran sebesar Rp.40.550.000 dengan realisasi sebesar Rp.9.935.00, kegiatan untuk merealisasikan IKU 3 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya .

IKU4. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT SKIPM Batam (UPI)

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara: (a) diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri; (b) pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan; (c) pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan (d) penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran. Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir.

BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran. Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Terdapat dua (2) unit pengolahan ikan yang menerpakan traceability pada Triwulan I tahun 2024. Unit Pengolah Ikan tersebut diantaranya adalah PT. Finindo Batam dan PT. Lintas Laut Samudera unit Pengolah Ikan tersebut bergerak dibidang pengolahan rumput laut yang kemudian di ekspor dengan negara tujuan China dan Vietnam.

Unit Pengolah Ikan yang telah dilakukan inspeksi penerapan trecebility mendapatkan surat keterangan traceability. Dengan mendapatkan surat traceability berarti Unit Pengolahan Ikan tersebut telah memiliki program dan prosedur system ketertelusuran serta telah menerapkannya dengan baik, dimana mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan baku dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran dan lokasi produk setelah dikirim.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Menyusun program dan sytem tracebility yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan baku, sejarah pengolahan dan lokasi produk setelah dikirim tidak mudah, dibutuhkan ketelitian dan pencatatan yang baik dalam kodefikasi produk yang dihasilkan dalam suatu produksi sehingga mudah untuk melakukan penelusuran apabila terjadi masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu diperlukan petugas kusus yang menangani serta system data base atau media untuk merekam semua informasi dan cara perekamannya juga harus jelas, walaupun untuk sebagian pelaku usaha masih dimungkinkan untuk melakukannya secara tradisional. Perekaman secara modern dapat dilakukan secara elektronik dan penyimpanan data dilakukan secara real time. Ketersediaan database elektronik yang baik akan memudahkan proses ketertelusuran saat diperlukan. Seiring dengan teknologi yang berkembang, maka metode modern juga berkembang. Penggunaan kode batang maupun penggunaan internet of things (IoT) yang memberikan data secara real time akan memudahkan proses identifikasi.

Rantai pangan global menuntut pemenuhan data, dan tantangan terbesar dari proses ketertelusuran adalah penyimpanan data yang bersifat multidimensi. Tanpa adanya kelengkapan dan kemudahan mendapatkan data suatu bahan baku, proses maupun produk, maka proses ketertelusuran tidak mudah dilakukan. Pengembangan teknik informatika akan mendorong kemudahan proses ketertelusuran seperti penggunaan IoT, big data, machine learning, dan sejenisnya perlu terus dikembangkan. Selain itu, dukungan regulasi pemerintah juga sangat diperlukan.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 4 diberikan anggaran sebesar Rp.20.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.0, kegiatan untuk merealisasikan IKU 4 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Tabel 6 Capaian Target dan Realisasi IKU 4 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2022	2023	Target	Persen
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam	Tidak ada IKU ini di tahun 2022	Tidak ada IKU ini di tahun 2023	0	0	0	Tidak ada IKU ini di tahun 2022	2	1	100

IKU5.Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPIlingkup SKIPM Batam (produk)

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan isik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan

muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertiikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertiikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011. Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertiikat PMMT/ HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan triwulan berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertiikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 5 diberikan anggaran sebesar Rp.45.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.200.000, kegiatan untuk merealisasikan IKU 5 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2022	2023	Target	Perse n
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	1	30	10	15	100	1	30	1	100

IKU6. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT SKIPM Batam (UPI)

Indikator pelaku usaha dalam hal ini Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah bersertifikat HACCP dan BKIPM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertiikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang

meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketelusuran.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran.

Terdapat dua puluh lima unit pengolah ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hasil evaluasi selama Triwulan III tahun 2023 lingkup Stasiun KIPM Batam. Untuk melihat konsistensi unit pengolah ikan dalam menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran maka dilakukan surveilan. Surveilan adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.

Setiap UPI pemegang Sertifikat Penerapan HACCP wajib dilakukan surveilan oleh Inspektur Mutu. Pelaksanaan surveilan harus disesuaikan dengan keberadaan proses produksi pada Unit Pengolahan Ikan. Pelaksanaan surveilan dapat dilakukan dengan kunjungan lapangan dan atau virtual sesuai kondisi dilapangan. Untuk produk yang pada saat surveilan tidak ada proses produksi, namun masuk dalam ruang lingkup, maka surveilan dilakukan dengan memeriksa manual HACCP dan rekaman kegiatan produksi yang dilakukan sejak 2 (dua) kali periode surveilan sebelumnya. Tim surveilan beranggotakan minimal dua orang yang terdiri dari ketua tim yang merupakan inspektur mutu dan anggota dengan kualifikasi minimal telah memiliki sertifikat HACCP dasar.

Frekuensi Surveilan dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. UPI dengan Grade A : 2 (dua) kali;
- b. UPI dengan Grade B : 3 (tiga) kali;
- c. UPI dengan Grade C : 4 (empat) kali.

UPT KIPM wajib membuat program tahunan surveilan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun berikutnya dan disampaikan ke Pusat Pengendalian Mutu untuk dilakukan evaluasi. Program tersebut direview/dikaji ulang oleh penanggungjawab pengawasan dan pengendalian mutu sebagai bahan evaluasi pelaksanaan surveilan tahun sebelumnya dan penyusunan program surveilan tahun berikutnya.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan

yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor, yang merupakan jaminan otentik dari pemerintah atau Negara. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disebut juga *Health Certificate* (HC) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), maka penerbitan HC didasarkan pada hasil surveilan terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada pelaku usaha/Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil pengujian.

Surveilan mencakup keseluruhan elemen system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan termasuk pengecekan terhadap penerapan persyaratan dasar (SSOP/GMP) dan HACCP, termasuk hasil monitoring internal (*own check*) serta hasil pengendalian supplier sesuai *checklist* surveilan.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 6 diberikan anggaran sebesar Rp.76.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 14.894.980, realisasi anggaran sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Tabel 8 Capaian Target dan Realisasi IKU 6 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2022	2023	Target	Perse
Presentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Batam	0	18	8	11	100%	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2022	100%	1	100%

IKU15. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup BKIPM adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikana oleh BKIPM dapat diterima oleh stakeholders kelautan perikanan, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indikator indeks efektifitas kebijakan pemerintah merupakan indikator di Level 0 yang

diturunkan ke seluruh level I dengan metode lingkup dipersempit. Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai nilai Indeks persepsi kualitas pelayanan BKIPM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN lingkup SKIPM BATAM antara lain melibatkan stakeholder dalam proses penyusunan kebijakan, sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder di daerah, menyusun policy brief atas pelayanan yang telah diambil dan mengevaluasi kualitas pelayanan tersebut untuk dilakukan penyempurnaan lebih lanjut, survei peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peningkatan kualitas layanan di lapangan. Disamping itu, telah digunakannya fasilitas media sosial untuk menyerap aspirasi stakeholder. Sehingga dari hasil evaluasi, diharapkan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai fokus perbaikan kualitas pelayanan publik, diantaranya:

- a. Melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses penyusunan Standar Pelayanan
- b. Menindaklanjuti hasil SKM seluruhnya secara lebih cepat.
- c. Menyediakan ruang khusus untuk layanan konsultasi dan pengaduan tatap muka.
- d. Memperluas media dokumentasi hasil konsultasi dan penanganan pengaduan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.
- e. Meningkatkan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik menjadi bulanan
- f. Mempertimbangkan alokasi anggaran untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik dan
- g. Memonitoring pelaksanaan e-service agar berkelanjutan dan mengikutsertakan pada kompetisi inovasi

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam selaku salah satu unit instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik tentu tidak dapat terlepas tuntutan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan publik. Selain itu, salah satu persyaratan ISO 9001 : 2015, SNI ISO/IEC 17020 : 2012 dan SNI ISO/IEC 17025 : 2017 juga mempersyaratkan akan pentingnya umpan balik pelanggan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Unsur Survey Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di unit pelaksana teknis (UPT) BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM) masyarakat/pengguna jasa dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkippm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM. Hasil survey kepuasan masyarakat pada Triwulan I tahun 2024 Stasiun KIPM Batam bernilai 91,88 dengan kategori **sangat baik**. Nilai survey ini diperoleh dari 53 responden pelaku usaha perikanan pengguna layanan Stasiun KIPM Batam dari 9 unsur pertanyaan dengan nilai rata-rata per unsur sebagai berikut : persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis pelayanan, sistem, mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan, biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan masukan, serta fasilitas pelayanan.

Tabel 15 Capaian Target dan Realisasi IKU 15 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan I 2024			Realisasi TW I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2022	2023	Target	Persen
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam	0	0	84	94.44	100%	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2022	94	3.62	0

9	Sarana dan prasarana (Layanan Konsultasi)	3,75	Sangat Baik
---	---	------	-------------

Nilai unsur tertinggi terdapat pada Triwulan I ini yaitu pada unsur **Prosedur Pelayanan**. Berdasarkan perhitungan hasil secara keseluruhan nilai unsur pada Triwulan I ini diperoleh nilai sebesar **94,44** dengan kategori "**SANGAT BAIK**" (hasil perhitungan terlampir).

IKU8. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Batam (%)

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu. Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA. Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Tabel 8 Capaian Target dan Realisasi IKU 8 pada Triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Batam	95	92	92	100	100%	100%	100%	95	95

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 8 diberikan anggaran sebesar Rp.25.902.000 dengan realisasi sebesar Rp. 16.696.900, belum ada kegiatan tambahan untuk merealisasikan IKU 8 dari triwulan sebelumnya namun realisasi anggaran sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

IKU9. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Batam (Unit)

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/ PERMEN- KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 16 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan HPIK atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi IKI. Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. IKI yang sudah menerapkan prinsip-prinsip CKIB dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB juga sudah berbasis online sejak tahun 2016, dan dapat diakses oleh seluruh UPT KIPM di Indonesia. SCKIB diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari UPT KIPM dan melalui proses verifikasi serta evaluasi oleh Tim Pusat.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 9 diberikan anggaran sebesar Rp.34.500.000 dengan realisasi sebesar Rp.21.215.000, kegiatan untuk merealisasikan IKU 9 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Tabel 10 Capaian Target dan Realisasi IKU 9 pada Triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Batam (Unit	1	6	3	3	100%	1	2	4	100

VERIFIKASI UNIT USAHA PERIKANAN YANG MEMENUHI STANDAR DAN MENERAPKAN BIOSEKURITI
LINGKUP SKIPM BATAM
TRIWULAN III TAHUN 2023

No.	Nama Perusahaan / Instansi	Jenis sertifikat	SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN (SIKI)		
			A (SIKI BARU)	B (SIKI PERPANJANGAN)	C (INSPEKSI TAHUNAN)
1	CV. Cahaya Sandi Novala	IKI	000697/IKI-BKIPM.2/II/2023		
		CKIB	000697/CKIB-BKIPM.2/II/2023		
2	PT. Sumber Jaya Makmur Kelautan	IKI		000118/IKI-BKIPM.2/III/2023	
		CKIB		000118/CKIB-BKIPM.2/III/2023	
3	PT. Joeann Artha Niaga	IKI			0361/IKI-BKIPM.2/VII/2022
		CKIB			0361/CKIB-BKIPM.2/IX/2022
JUMLAH KESELURUHAN SIKI = A + B + C			3		



Ketua Tim Kerja

 Anita Yuni Praptiwi, S.Pi

IKU10. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Supplier yang melakukan penanganan hasil perikanan sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu unit Supplier menerapkan good manufacturing practices dan standard sanitation operatiprocedure secara konsisten. Sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Supplier yang melakukan pengolahan hasil perikanan sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu unit Supplier menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasar konsepsi PMMT/HACCP secara konsisten. Mengacu Keputusan Kepala BKIPM nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik di supplier sertifikat cara pengolahan ikan yang baik di supplier

Tabel 11 Capaian Target dan Realisasi IKU 10 pada Triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Targ et 2021	Target 2022	Triwulan III 2023			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisa si	%	2021	2022	Targ et	Pers en
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan	0	0	3	5	100%	0	0	32	100

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 10 diberikan anggaran sebesar Rp.50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.25.442.500, kegiatan untuk merealisasikan IKU 10 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Daftar Sertifikat CPIB Suplier yang Diterbitkan
Triwulan III Tahun 2023

SKIPM Batam

No	Nama	Alamat	Produk	No sertifikat	Tanggal Terbit	Berlaku sampai
1	PT. Lang Laut Tuah Kepri	Jalan Batin Bidin RT.004 RW.001, Desa/Kelurahan Rempang Cate, Kec. Galang, Kota Batam, Riau Archipelago -Indonesia	Rumput Laut Kering/ Dried Seaweed	001/CPIB/43/II/2023	2 Februari 2023	2 Februari 2027
2	Amanda Reza	Kampung Bugis, Pasir Putih, Kel. Sekanak Raya, Belakang Padang, Kep. Riau	Fresh Marine Product	004/CPIB/43/II/2023	21 Maret 2023	21 Maret 2027
3	PT. Sasco Maritime Indonesia	Jl. Patimura, Teluk Nipah, Telaga Punggur, Batam, Kep. Riau	Frozen Pelagic Fish	005/CPIB/43/II/2023	21 Maret 2023	21 Maret 2027
4	PT. Sinergi baru indonesia	Jembatan 3, Jalan Trans Barelang, Pulau Nipah, Desa/Kelurahan Pulau Sekotok, Kec. Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau	Rumput Laut Kering/ Dried Seaweed	013/CPIB/43/VIII/2023	31 Agustus 2023	31 Agustus 2027
5	Muhammad rahim	Kampung Bugis, Pasir Putih, Kel. Sekanak Raya, Belakang Padang, Kep. Riau	Fresh Marine Product	019/CPIB/43/IX/2023	19 September 2023	19 September 2027
Jumlah Sertifikat CPIB Tahun 2023					5	

Mengatakan
Kepala SKIPM Batam



M. Darwiswanto, S.Pi., M.Si

Batam, 30 September 2023

Penanggung Jawab Indikator Kinerja
Ketua Tim Kerja

Anita Yuni Praptiwi, S.Pi

Sasaran Kinerja 3.1 Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

IKU12. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Batam

SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (*attitude*), keahlian (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya dilaksanakan melalui sistem penempatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

Pengembangan SDM BKIPM, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan BKIPM.

Keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU indeks profesionalitas ASN memiliki angka target pada tahun 2024 adalah

83. Realisasi target dilakukan pada akhir tahun saat penilaian. Data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 22 Capaian Target dan Realisasi IKU12 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I			Realisasi TW I	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2022	Target	Perse n
Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Batam	0	0	0	0	0	Tidak ada target untuk TW I	83	100

IKU13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Batam (Nilai)

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No.249/2011.

$$NK = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (PK \times Wpk) + (E \times We)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot

Penyerapan Anggaran (WP) = 9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah

bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran

(WPK) = 43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot

Efisiensi (WE) = 28,6%)

Realisasi target dilakukan pada akhir tahun saat penilaian. Data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian Target dan Realisasi IKU13 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2023	Target	Persen
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Batam (Nilai)	0	0	0	0	0	Tidak ada realisasi di di TRIWULAN I karena tidak ada target di TRIWULAN I	82	100

IKU14 . Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT SKIPM Batam (%)

Dalam suatu instansi perlu adanya pemeriksaan secara menyeluruh guna untuk mengevaluasi kinerja Satker SKIPM Batam, untuk itu BPK(Badan Pemeriksa Keuangan)merupakan suatu instansi yang diberi tanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja Satker BKIPM Batam dan BPK akan mengeluarkan nilai temuan LHP,

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Skala	Opini
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar dengan pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Ket: "Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya"

karena realisasi IKU ini baru dilaksanakan di Tahun 2022 maka untuk realisasi tahun 2020 dan 2021 tidak ada, untuk mengetahui jumlah realisasi/ persen capaian IKU ini dapat dilihat di tabelble dibawah ini :

Tabel 24 Capaian Target dan Realisasi IKU 14 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I 2023	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%		Target	Persen
Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT SKIPM Batam (%)	0	0	0	0	0	0	≤1	0



IKU15 . Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Batam

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada SKIPM Batam berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan II Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh SKIPM BATAM yang menjadi objek pengawasan. Data temuan hasil pengawasan Itjen KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu periode LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP. Setiap instansi setelah melaksanakan review kinerja maka akan dikeluarkan temuan yang didapatkan selama proses review dilaksanakan untuk itu perlu adanya rekomendasi hasil pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaiki kinerja lingkup satker , keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja capaian IKU inidapat dilihat di table dibawah ini :

Tabel 25 Capaian Target dan Realisasi IKU22 pada Triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2023	Target	Persen
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LingkupSKIPM Batam	82	75	80	98.53	100%	75	75	100

IKU16. Nilai IKPA lingkup Stasiun KIPM Batam

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER 4/PB/2020 tentang tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU nilai IKPA memiliki angka target pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 26 Capaian Target dan Realisasi IKU16 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2023	Target	Persen
Nilai IKPA lingkup Stasiun KIPM Batam	0	0	0	0	0	Tidak ada realisasi untuk Triwulan I karena target dibuat di TW IV	89	100

IKU17. Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Batam

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan

sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing

Tabel 27 Capaian Target dan Realisasi IKU25 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2023	Target	Persen
Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Batam	86	0	0	0	0	Tidak ada realisasi untuk Triwulan I karena target dibuat di TW IV	81	100

IKU18. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam

Untuk Tahun 2023 IKU untuk tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa ditambahkan sebagai indikator kinerja lingkup SKIPM Batam, hal ini dikarenakan untuk pengadaan barang dan jasa harus disesuaikan dengan target yang terdapat di RKAKL.

Tabel 28 Capaian Target dan Realisasi IKU18 pada Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2023	Target	Persen
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam	0	0	0	0	0	Tidak ada realisasi IKU ini di TRIWULAN I karena target dibuat di TW IV	100	0

IKU19. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Batam

Untuk Tahun 2024 IKU untuk tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup SKIPM Batam ditambahkan sebagai indikator kinerja lingkup SKIPM Batam, hal ini dikarenakan untuk pencatatan, pengadministrasian barang dan jasa sudah menjadi perhatian oleh BPK ,oleh karena itu untuk realisasi di tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat realisasi.

Tabel 29 Capaian Target dan Realisasi IKU19 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realiasi TW I	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2023	Target	Persen
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LingkupSKIPM Batam	0	0	0	0	0	Tidak ada realisas IKU ini di TRIWULAN I karena target dibuat di TW IV	100	0

REALISASI LANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Batam pada Triwulan I anggaran (T.A) 2024 adalah **Rp.6.299.219.000-**. Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Batam sebesar **Rp. 986.154.019** atau sebesar **24.45%** dari keseluruhan pagu anggaran. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM Batam T.A 2024 Triwulan I berdasarkan jenis kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I TA. 2024

No.	Kode/Kegiatan	Pagu	Realisasi TRIWULAN I	%
1	3987/Dukungan Manajemen	3.796.669.000	371,133,618	25.26%
3	3989/Pengendalian Mutu	237.050.00	27.029.980	11.40%
4	3990/Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	265.500.000	0	0 %
	TOTAL	4.299.219.000	986.154.019	24.45%

Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III TA. 2023

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TRIWULAN I	%
1	Belanja Pegawai	1,968,079,000,-	556,508,823,-	28.28
2	Belanja Barang	2,261,140,000,-	429,645,196,-	19
3	Belanja Modal	0,-	0,-	0
	TOTAL	6,280,700,000,-	986,154,019,-	24.45

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Batam Triwulan I tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

REKOMENDASI

Evaluasi rencana aksi capaian kinerja Stasiun KIPM Batam Triwulan I Tahun 2024 dilakukan dengan cara mengevaluasi dari rencana aksi yang telah disusun, membandingkan antara target (rencana) dan realisasi setiap IKU pada masing-masing perspektif. Evaluasi rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi maka dapat diketahui beberapa hal pada pencapaian IKU antara lain: Secara umum pencapaian kinerja Stasiun KIPM Batam sudah baik dengan diperolehnya nilai NPSS sebesar 110,80 % pada aplikasi kinerja dan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023.

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan pada tahun berikutnya:

1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pendukung IKU pada tahun 2023 sehingga dapat meningkatkan percepatan target kinerja di Triwulan IV 2023
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Tahun 2023 sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pengukurannya bersifat triwulanan, agar dapat direalisasikan triwulan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan I Tahun 2024, secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Batam pada Triwulan I telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah terus meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian indikator kinerja Stasiun KIPMBatam, sehingga dapat tercapai yang maksimal.



STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASILPERIKANAN BATAM

JL. M NAHAR – BELIAN – BATAM

LAMPIRAN-LAMPIRAN

